

DAFTAR PUSTAKA

Sumber dari Buku :

- Atmosudirdjo, Prajudi. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Budi Santoso. *Hukum Sumber Daya Alam*. Yogyakarta: FH UII Press, 2018.
- Haryadi, Dwi. *Pengantar Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*. Bangka Belitung: UBB Press, 2018.
- Kartikasari, Feby Ivalerina. *Strategi Regulasi untuk Mendorong Hilirisasi Pertambangan yang Berwawasan Lingkungan*. Bandung: Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
- Khairandy, Ridwan. *Hukum Investasi*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Nugroho, Sigit Sapto, Yulias Erwin, dan Rina Rohayu H. *Hukum Sumber Daya Alam Perspektif Keadilan Inter-Antar Generasi*. Disunting oleh Elviandri dan Farkhani. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2019.
- Rangkuti, Siti Sundari. *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*. Surabaya: Airlangga University Press, 2000.
- Salim H.S. *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2019.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020.
- Sutedi, Adrian. *Good Corporate Governance*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Sutedi, Adrian. *Hukum Pertambangan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Suyatono, dkk. *Good Mining Practice*. Jakarta: Mutiara Bumi, 2003.

Yani, A. A. *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Yohanes, Sri. *Perizinan: Problem dan Upaya Pembenahan*. Jakarta: Grasindo, 2009.

Sumber Perundang-undangan :

Indonesia. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batubara.

Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang.

Sumber dari Jurnal, Karya Ilmiah dll :

Boymau, Melkianus, Saryono Yohanes, dan Dhesy A. Kase. "Reformulasi Pengaturan Pembinaan dan Pengawasan Pertambangan dalam Perspektif Reorientasi Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota." *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)* Vol. 4, No. 4 (2025): 3397–3405.

Hidayat, Syamsul. "Hilirisasi Mineral Pengelolaan Nikel di Indonesia." *Journal Scientific of Mandalika (JSM)* Vol. 6, No. 9 (2025).

Rynaldi, Alfredo, Efrata Hamonangan Sinaga, dan Jhonathan Roganda Sitorus. "Kajian Kriminologi Hijau terhadap Studi Kasus Hilirisasi Tambang Nikel." *JLKI: Jurnal Lingkungan Kebumihan Indonesia*.

Darongke, Friskilia Junisa Bastiana, Dientje Rumimpunu, dan Sarah D. L. Roeroe. *Efektivitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral di Indonesia*. Karya ilmiah bidang hukum pertambangan.

Rynaldi, Alfredo, Efrata Hamonangan Sinaga, dan Jhonathan Roganda Sitorus. *Kajian Kriminologi Hijau terhadap Studi Kasus Hilirisasi Tambang Nikel*. Depok: Universitas Indonesia, 2023.

Situmorang, Alex Permana. *Kerusakan Lingkungan yang Diakibatkan oleh Hilirisasi Nikel*. Cimahi: Program Studi Ilmu Hukum, FISIP Universitas Jenderal Achmad Yani.

Surya, T. Ade. *Penguatan Kapasitas Hulu untuk Hilirisasi Nikel Berkelanjutan*.

Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal. "Pemerintah Sampaikan Arah Penguatan Pengawasan Bea Keluar dan Evaluasi PMN dalam Raker Komisi XI." Portal Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 8 Desember 2025.

- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. *Booklet Nikel FA: Peluang Investasi Nikel Indonesia*. Jakarta: Kementerian ESDM, 2020.
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. “Kementerian ESDM Tetapkan 1.215 Wilayah Pertambangan Rakyat.” Siaran pers, 28 Maret 2024.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. “SIMBARA: Solusi Perbaikan Tata Kelola Sektor Minerba dan Optimalisasi Penerimaan Negara.” Portal Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. “Hilirisasi Nikel di Indonesia, Kemenperin Buka Suara.”
- Ombudsman Republik Indonesia. “Perubahan Kewenangan dari Daerah ke Pusat Akibatkan Kompleksitas Tata Kelola Izin Usaha Pertambangan.”
- Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute. [*Judul publikasi*]. Jakarta: PASPI, 2024.
- Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia. “Industri Hilir Nikel Rentan Tak Kompetitif Lagi, Efek BMAD China.” Perhapi, 3 Juli 2025.
- Suryawan, Audry Amaradyaputri. “Penguatan Tata Kelola Hilirisasi Nikel Indonesia.” *Analisis Strategis terhadap Isu Aktual* Vol. XVII No. 22/II/PUSAKA (2025). Badan Keahlian DPR RI.
- Tangkudung, Audrey G., dan Jemmi Y. Kaseger. *Hilirisasi Nikel sebagai Nilai Tambah dalam Penguatan Perekonomian Indonesia*. Jakarta: IBM ASMI, 2020.
- DPR RI. “Hilirisasi Nikel Jangan Berhenti di Produk Setengah Jadi.” *Nikel.co.id*, 11 November 2025.
- Ridwan, Akbar. “45% Izin Tambang Nikel RI Berada di Sulawesi Tenggara pada 2024.” *Katadata.co.id*, 17 November 2025.